

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA PASAR LAPAN KECAMATAN
AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

OLEH:

RESTU

198520024



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/23

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA PASAR LAPAN KECAMATAN AIR
PUTIH KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**OLEH :
RESTU
198520024**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Peranan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

NAMA : Restu

NPM : 198520024

FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si


Bekahmamero Simamora, S.IP, MPA

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL

Ka. Prodi Administrasi Publik

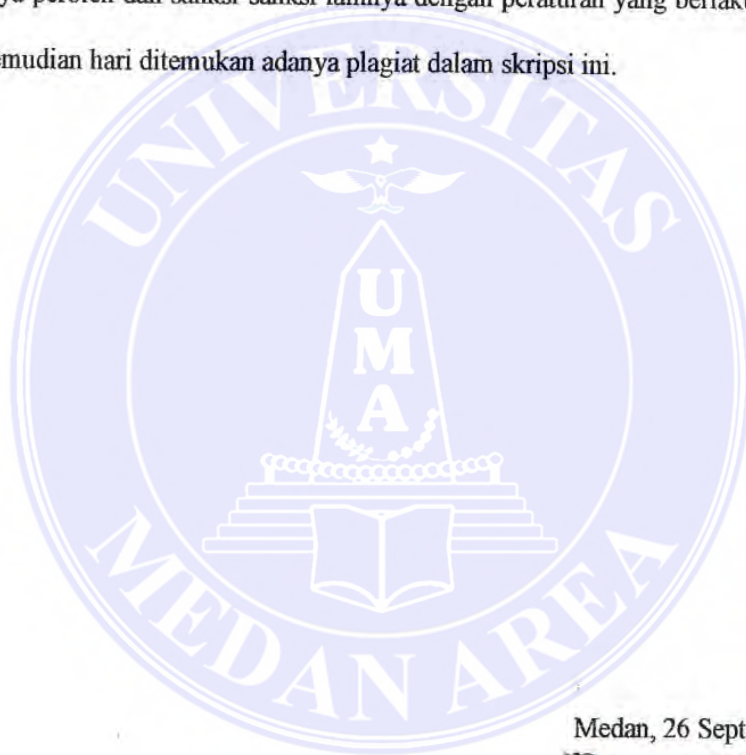

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal Lulus : 26 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 September 2023



198520024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restu
NPM : 198520024
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 26 September
2023

Yang menyatakan



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan judul **Peranan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Agung Suharyanto S.Sn, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing peneliti dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing peneliti dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap M.AP selaku Sekretaris dalam membimbing penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan Staf administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama peneliti mengikuti perkuliahan.
8. Terkhusus kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Sumanto dan Ibu Rusnah yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa serta materi yang selalu diusahakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak saya Riska Ristiana dan Desy Nadya, dan juga kepada adik saya Putri Fadhillah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
10. Kepada teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, dan ikut berkontribusi dalam mengoreksi skripsi dan menjadi tempat bertukar pikiran, serta memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
11. Kepala Desa Pasar Lapan, Pendamping Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa dan Masyarakat yang berkenan menjadi infoman penelitian
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik yang selalu memberikan semangat dan doanya.

Medan, 26 September 2023
Peneliti,

Restu

ABSTRAK

Dalam pemberdayaan desa dibutuhkan adanya pendamping dari pemerintah yaitu seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana Peranan Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan untuk mengetahui faktor penghambat peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah teori peran dari Yusuf Iyas yang memiliki tiga indikator, yaitu regulator, fasilitator, dan dinamisator. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pendamping Desa sudah berjalan namun belum optimal. Terdapat faktor penghambat peran pendamping Desa Kurangnya dana untuk melakukan pemberdayaan dan Minim nya sumber daya manusia dalam ikut serta pemberdayaan masyarakat. Serta Kurangnya perhatian dan sosialisasi dari pendamping desa. Untuk berjalan pemberdayaan masyarakat Pendamping desa menyelenggarakan kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat minimal 2 bulan sekali dan Pendamping desa melakukan monitoring dalam kegiatan balai desa. Pemerintah desa mengusulkan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat dengan memanfaatkan dana desa yang ada dengan kegiatan yang minim biaya.

Kata Kunci: Peranan, Pendamping Desa, Pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. Republic of Indonesia Number 2015 concerning Village Facilitators, to find out how the Role of Village Facilitators in Community Empowerment in Pasar Lapan Village, Air Putih District, Batu Bara Regency and the inhibiting factors. The theory used is the role theory of Yusuf Iyas, descriptive method with a qualitative, approach Village Facilitators have lack of funds to carry out empowerment and lack of human resources in Village Facilitators holding activities or outreach to the community at least once every 2 months.

Keywords: Role, Village Facilitator, Community Empowerment



RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Restu, Lahir pada 10 Desember 2001 di Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Penulis meruakan anak ketiga dari empat bersaudara. Tahun 2013 Penulis Lulus di SDN 013872 Pasar Lapan, Tahun 2016 Penulis Lulus dari MTS YAPI Sipare-pare, Selanjutnya Tahun 2019 Penulis Lulus dari SMA NEGERI 1 Air Putih, dan Tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Peranan	9
2.2 Pengertian Pendamping Desa	14
2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Desa.....	16
2.3 Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.3.1 Masyarakat Desa.....	18
2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat	20
2.3.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	22
2.3.4 Tujuan Pemberdayaan.....	22
2.3.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
2.5 Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Desa Pasar Lapan	46
4.1.2 Struktur Organisasi Desa Pasar Lapan	49
4.1.3 Tugas Pokok Pemerintahan Desa Pasar Lapan	50

4.1.4 Penduduk Desa Pasar Lapan	54
4.1.5 Sarana dan prasarana Desa Desa Pasar Lapan.....	54
4.2. Pembahasan Penelitian.....	54
4.2.1. Peranan Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.....	55
4.2 Faktor Penghambat Peranan Pedamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Sarana dan Prasaran	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	48
Gambar 1 Wawancara Dengan Pendamping Desa	79
Gambar 2 Wawancara Dengan Kepala Desa	79
Gambar 3 Wawancara Dengan Sekertaris Desa	80
Gambar 4 Wawancara Dengan Pegawai Desa.....	80
Gambar 5 Wawancara Dengan Masyarakat.....	81
Gambar 6 Lokasi Penelitian.....	81
Gambar 7 Surat izin Penelitian dari Kampus.....	82
Gambar 8 Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	79
Lampiran 2 Panduan Wawancara.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemerintahan yang baik hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, yang berarti bahwa adanya hubungan yang kompleks antara tiga elemen tersebut (Rahmanurrajjid, 2008:56). Sama halnya dengan kebijakan adanya program pendamping desa, jadi antara pemerintah desa, pendamping desa, serta masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu ketiganya harus berjalan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan pendamping desa dalam menjalankan peran dan fungsinya, dapat melakukan proses studi atau kajian secara berkesinambungan dengan sesama pendamping sebagai tim Kualitas sumber daya manusia selalu tidak akan terlepas dari sebuah pekerja profesional. Sehingga sebuah kualitas kerja, haruslah dilibatkan dalam konteks kerja yang merupakan profesi seseorang. Karenanya, tidak mengherankan apabila kualitas sumber daya manusia yang tinggi diharapkan muncul pada kaum profesional, hal ini tidak mengherankan karena kaum profesional lah yang memiliki keahlian, organisasi dan kode etik yang memudahkan mereka untuk mengembangkan konsep, tolak ukur, bahkan ukuran yang bisa mereka gunakan untuk menilai dan membentuk citra diri mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada Manajemen SDM itu sendiri.

Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Pendampingan Masyarakat Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Pendamping Desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dari kementerian, Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa yang dimaksud dengan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: Konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main).
- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elite adalah suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite.
- c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu

agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural delimitasi. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena alasan kelas sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

- d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis.

Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- a) **Kekuatan atas pilihan pribadi.** Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b) **Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri.** Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c) **Kekuatan dalam kebebasan berekspresi.** Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.

- d) **Kekuatan kelembagaan.** Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- e) **Kekuatan sumber daya ekonomi.** Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f) **Kekuatan dalam kebebasan reproduksi.** Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi (Ife, Jim, 1997: 60-62).

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan desa, menurut Pahlevi (2017:89) pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa, yang menunjukkan pentingnya pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Namun faktanya adalah keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Sunarti (2016:102) menjelaskan bahwa antara sarjana pendamping masih terdapat jarak interaksi sebagai orang luar dengan

masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu bantuan secara maksimal oleh kader pemberdayaan masyarakat, sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh dan disegani di desa tersebut, bisa seorang tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan.

Perlunya peran pendamping desa tersebut untuk memfasilitasi masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang ditemukan sebagai sebuah tantangan pendamping desa yaitu, dimana belum maksimal pada program-program pembinaan untuk masyarakat luas, kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pendamping desa sehingga membuat masyarakat menjadi kurang mandiri dan tidak menggunakan atau memelihara fasilitas-fasilitas yang sudah ada, dan kurangnya dana untuk membuat kegiatan atau sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat di desa pasar lapan Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, Maka peneliti merumuskan ada dua permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peranan pedamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara?
2. Apa saja faktor penghambat peranan pedamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peranan pedamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat peranan pedamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis di harapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang kebijakan pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri melalui peran pendamping desa yang ditempatkan diberbagai provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
2. Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat menambah wawasan

dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan system informasi.

3. Secara praktis memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai tugas dan fungsi dari pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peran menurut Soekanto (2002: 243), yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Soekanto (2001:242) menyatakan peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan

baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seseorang memenuhi peran ketika dia memenuhi tanggung jawab dan haknya sesuai dengan kedudukannya. Ilmu memperoleh manfaat dari perbedaan kedudukan dan peranan. Karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan.

Peran adalah urutan logis dari tindakan yang berasal memegang posisi istimewa atau bekerja di kantor yang langsung dapat dikenali. Kepribadian juga dapat memiliki dampak signifikan pada bagaimana peran dilakukan karena seseorang sadar bahwa mereka tidak bekerja sendiri, peran muncul. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Peranan ini berupa serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut meliputi:

a) Cara (*Usuge*)

Cara Merupakan lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

b) Kebiasaan (*folkways*)

Kebiasaan merupakan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

c) Tata kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

d) Adat istiadat (*custom*)

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat (Soekanto, 2012:17).

Soekanto (2012:212) menjelaskan Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan Ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Pentingnya peranan adalah kerana ia mengawal tingkah laku seseorang. Peranan yang menyebabkan seseorang mempunyai batas tertentu dapat meramalkan tindakan orang lain. Orang yang berkenaan akan dapat menyesuaikan tingkah laku mereka sendiri kepada tingkah laku kumpulan orang. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peran termasuk 3 perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan termasuk norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini adalah satu siri peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.
- b. Peranannya adalah konsep tentang apa yang boleh dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.

- c. Peranan ini juga boleh dikatakan sebagai pelakon individu yang penting kepada struktur sosial masyarakat.

Pembangunan - pembangunan dijangka memberi kesan positif terhadap kehidupan rakyat, yang bermaksud bahawa kejayaan pembangunan adalah manifestasi keinginan dan keperluan orang-orang yang tinggal di kampung dan kawasan di mana mereka tinggal. Kejayaan dan kegagalan pembantu desa dalam menjalankan tugas kepimpinan mereka sangat dipengaruhi dan disokong oleh kebolehan, pengalaman dan pemahaman mereka tentang masalah komuniti yang mereka impikan.

Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pemberdayaan adalah faktor partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sangat diperlukan, sebab keinginan disitu pihak tentu saja tidak bisa terwujud jika tidak didukung oleh pihak lain karena bisa berakibat menjadi terkendalanya proses penyelenggaraan pemberdayaan. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu:

- 1) Partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pemberdayaan partisipasi.
- 2) Partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Peranan itu diharapkan tingkah laku seseorang atau kumpulan yang mempunyai status. Walaupun status itu sendiri sebagai pangkat atau kedudukan seseorang dalam kumpulan, atau kedudukan kumpulan yang berkaitan dengan

kumpulan lain. Ini bermakna status dan peranan adalah dua aspek fenomena yang sama. Status adalah satu set hak dan kewajiban, sementara peranannya adalah penerapan set kewajiban dan hak. Menurut kamus sosiologi definisi peranan adalah seperti berikut:

1. Aspek dinamik kedudukan.
2. Set hak dan kewajiban.
3. Tingkah laku sebenar pemegang kedudukan.
4. Sebahagian dari pada aktiviti yang dimainkan oleh seseorang.

Konsep status dan peranan ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat. Perwujudan status dan peranan itu adalah kewujudan tugas yang dilakukan oleh seseorang berkenaan dengan kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Peranan yang wujud dalam seseorang mesti dibedakan daripada status seseorang dalam masyarakat yang merupakan elemen status yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Dalam peranan ini terdapat dua jenis harapan, sementara harapannya adalah:

- a) Harapan dari masyarakat untuk pemegang peranan atau kewajiban pemegang peranan.
- b) Jangkaan yang dipegang oleh pemegang peranan masyarakat atau orang yang berkaitan dengannya dalam melaksanakan peranan atau kewajibannya.

Menurut Yusuf (2014: 05) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah peran dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Regulator adalah tindakan berupa kegiatan untuk merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;

Dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat; Fasilitator adalah penyedia sumber daya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Pengertian Pendamping Desa

Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah Jabatan dibawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :

- a) Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
- b) Tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- c) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan , dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan

Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

d) Menjadi Pendamping Lokal Desa berdasarkan Panduan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjut Tingkat Lanjut (SLTA) atau sederajat.
2. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.
3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa.
4. Memiliki pengetahuan dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat.
5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.
7. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa.
8. Mampu mengoperasikan Komputer minimal program Office (Word, exel, Power Point) dan internet.
9. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standart operasional prosedur dan siap bertempat tinggal dilokasi tugas.
10. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (Dua puluh lima) tahun dan maksimal (Lima puluh) Tahun. Bukan pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik.

11. Tidak sedang memiliki kontrak kerja professional dengan pihak lain.
12. Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, Panduan teknis rekrutmen Tenaga pendamping professional Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2017

Adapun sanksi yang diberikan kepada Pendamping Desa yang kurang menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana mestinya, melakukan Pelanggaran terhadap kode etik pendamping, memasukkan data laporan palsu ke dalam aplikasi laporan harian yang ada di sistem informasi desa, maka berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) akan dikenai sanksi sebagai berikut.

1. Teguran
2. Surat Peringatan Pertama
3. Surat Peringatan Kedua
4. Surat Peringatan Ketiga sekaligus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara.

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Desa

1. Tugas Pokok Pendamping Desa

Dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya

alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat Desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan.
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Fungsi Pendamping Desa

Mendampingi dan memberdayakan masyarakat pasar lapar dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan Kementrian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa No.3 Tahun 2015 Tugas – tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pendamping Desa tidaklah mudah. Oleh sebab itu seorang pendamping haruslah tangguh dan berpengalaman. Dimana seorang pendamping Desa harus memiliki:

- a. Pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan oleh berbagai dokumen pengalaman.

- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa.
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa.
- d. Mampu melakukan teknik fasilitas kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa, dan.
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Pendamping Desa juga dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah desa pasar lapang dalam melaksanakan pembangunan di desa pasar lapang sesuai dengan tuntunan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia.

2.3 Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Ruang lingkup pengaturan Hak Masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68, berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat Desa ini telah memperkuat peran masyarakat Desa sebagai subjek

pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah pasar lapas serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berhak untuk memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi aparatur.

Masyarakat berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan Desa. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang baik. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

Masyarakat juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap Negara telah diatur dalam Undang- undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945. Hak hak warga Negara Indonesia yang diperoleh dari Negara seperti hak untuk hidup

secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-undang. Sementara itu, kewajiban terhadap Negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti kewajiban untuk membela Negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, (2003:158) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan katakunci dari upaya pembangunan.

Menurut Toto Wardikanto, dkk (2013:61) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Menurut Edi Suharto dalam Alfitri (2011:26-27) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:

- 1) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
- 2) Penguatan, yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.
- 3) perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- 4) Penyokongan, yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi

keseimbangan didistribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

2.3.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan benar, yaitu sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan cara sukarela maupun demokratis dan menghindari unsur pemaksaan. Karena setiap individu memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, serta potensi yang berbeda-beda.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kebutuhan, masalah, dan potensi.
3. Pemberdayaan juga tidak bisa dilakukan dengan aspek satu saja tetapi perlu dilakukan secara keseluruhan terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

2.3.4 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan

sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan dengan pendampingan yang intensif terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

2.3.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan masyarakat maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat itu berdaya atau tidak sehingga sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan segenap upaya untuk dapat dikonsentrasikan kepada aspek-aspek apa saja dan sasaran perubahan. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang pemberdayaan masyarakat, Untuk menilai keberhasilan kerja Pendamping Desa dapat kita analisa dari beberapa indikator keberhasilan pendampingan, pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Peran pendamping Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan.
2. Peran pendamping Desa dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.
3. Peran pendamping Desa dalam pengawasan pemberdayaan masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: „kekuasaan di dalam“, „kekuasaan untuk“, „kekuasaan atas“ dan „kekuasaan dengan. Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah Desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan

hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap „berdaya“ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, tahun dan sumber	Teori dan Perbedaan	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa bintang meriah kecamatan batang kuis, kabupaten deli serdang. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Kiki Ahda Nasution. (2021)”	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori (Sumpeno: 2009). Jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, Observasi, Wawancara, dengan teknik pengumpulan data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peran yang penting dan dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa. Pendamping merupakan fasilitator atau agen perubahan yang memiliki motivasi dan idealisme yang tinggi untuk dapat mengabdikan serta menjadi bagian dari proses pembangunan di desa.	Perbedaan penelitian terletak pada perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Kekurangan penelitian terdahulu adalah Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih partisipatif dalam pembangunan desa.

				Kiki Ahda Nasution memilih lokasi penelitiannya di Desa Bintang Mariah.
2.	Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut permendesa no.3 tahun 2015 tentang pendampingan desa perspektif fiqih siyasah (studi kasus di nagori rambung merah kecamatan siantar kabupaten simalungun). Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Muhammad Khoir Simamora. (2021).	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori (Ralph linton, 2012). Jenis penelitian ini Menggunakan Deskriptif Kualitatif, Observasi, Wawancara, dengan teknik pengumpulan data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat Nagori Rambung Merah belum maksimal dilakukan. Belum maksimalnya dapat dilihat dari 3 indikator peran pendamping Desa. seperti, kurangnya partisipasi masyarakat, program yang tidak berkembang dan kurangnya pengawasan dari pendamping Desa	Perbedaannya penelitian ini berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat menurut permendesa no.3 tahun 2015 tentang pendampingan desa perspektif fiqih siyasah, Sedangkan penelitian ini Peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat, Kekurangan penelitian ini adalah Pendamping desa seharusnya memberikan arahan yang tepat agar kinerja perangkat desa tidak berbenturan dengan hukum dan salah menggunakan anggaran sehingga kegiatan tepat sasaran, serta mendampingi Desa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan jangan pada saat pelaksanaannya saja pendamping Desa terlibat. Muhammda Khoir Simamora memilih lokasi penelitian di desa nagori rambung merah.
3.	Optimalisasi peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus di kecamatan klapanunggal kabupaten bogor). Jurnal ASCARYA, Vol 1, No 2, 2021, Hal 241-251. Agustiar Revaldi. (2021).	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori (Rahmanurrajjid, 2008). Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif, observasi, wawancara, dengan teknik pengumpulan data.	Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pendamping desa di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sudah optimal dengan empat aspek pemberdayaan yang telah dilakukan. Pendamping desa mampu meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan pembangunan. Fokus penelitian terdahulu adalah Optimalisasi peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Sedangkan penelitian ini Peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Agustiar Revaldi melakukan

			<p>Pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dan pemberdayaan selama lima tahun terakhir, secara umum telah menunjukkan eksistensinya menuju perubahan sistem pemerintahan desa yang sehat dan mandiri.</p>	<p>penelitian di Kecamatan klapanunggal Kabupaten Bogor.</p>
4.	<p>Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di desa pulau tengah kecamatan benai kabupaten kuantan singingi. Skripsi Universitas Islam Riau. Fini Sriolineta (2019).</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori (Abdul, 1987:100). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi, wawancara, dengan teknik pengumpulan data.</p>	<p>Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peranan Masyarakat Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai dalam perencanaan program pembangunan yaitu: Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam organisasi masyarakat</p>	<p>Perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian sekarang. Fokus penelitian terdahulu adalah Peranan pendamping desa dalam membantuy pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, Sedangkan penelitian ini adalah Peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Kekurangan pada penelitian terdahulu adalah Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk materi maka pemerintah desa bersama dengan Masyarakat Desa Pulau Tengah Kecamatan Benai yang ada hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah bersedia menyumbang hartanya untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan desa, tentunya dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis, terperinci, dan transparan kepada masyarakat tentang</p>

			Desa Pulau Tengah kecamatan Benai masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.	realisasi kegunaan dana swadaya yang telah dimanfaatkan tersebut. Laporan tersebut hendaknya diketahui oleh seluruh masyarakat desa, sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat lainnya secara ikhlas untuk berpartisipasi dalam bentuk materi. Fina srionilita memilih penelitian di desa pulau tengah.
5	Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera (studi kasus di kabupaten sragen). Jurnal SOSIO KONSEPSIA, Vol 5, No 1, 2015, Hal 340-354. Suyanti & Bambang Pudjianto (2015).	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori (Sugiyono, 2010). Jenis penelitian ini Menggunakan Deskriptif Kualitatif, Observasi, Wawancara, dengan teknik pengumpulan data.	Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban dengan pola keterpaduan berhasil dengan baik. Hal ini terbukti, melalui pemberdayaan mengelola tanaman sayuran dan perkebunan menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi semakin sejahtera serta memiliki harapan ke depan. Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian disarankan, untuk memaksimalkan pemberdayaan keluarga miskin, sebaiknya bisa dilakukan secara terpadu melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti pendamping lapangan dan orsos/LSM yang ada di lokasi. Bagi pemerintah dalam	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Fokus penelitian sebelumnya adalah Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera, Sedangkan penelitian ini adalah Peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat. Suyanti & Bambang Pudjianto memilih penelitian di Kabupaten sragen.

			penanganan semua program yang menyangkut kemiskinan perlu menjaga sinergitas antar lembaga dengan pendekatan terintegrasi.	
--	--	--	--	--

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian dideskripsikan secara umum adalah sebagai alur pemikiran yang logis dan menghubungkan antara teori dan konsep dengan berbagai variabel penelitian yang ditandai sebagai masalah penting. Kerangka berfikir penelitian bermanfaat untuk membuat hipotesis atau kesimpulan sementara penelitian.

Penyusunan penelitian yang akan dilakukan ini harus berdasarkan pada kerangka berfikir penelitian. Secara garis besar kerangka berfikir penelitian ini adalah peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

Menurut Yusuf (2014:05) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah peran dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator.

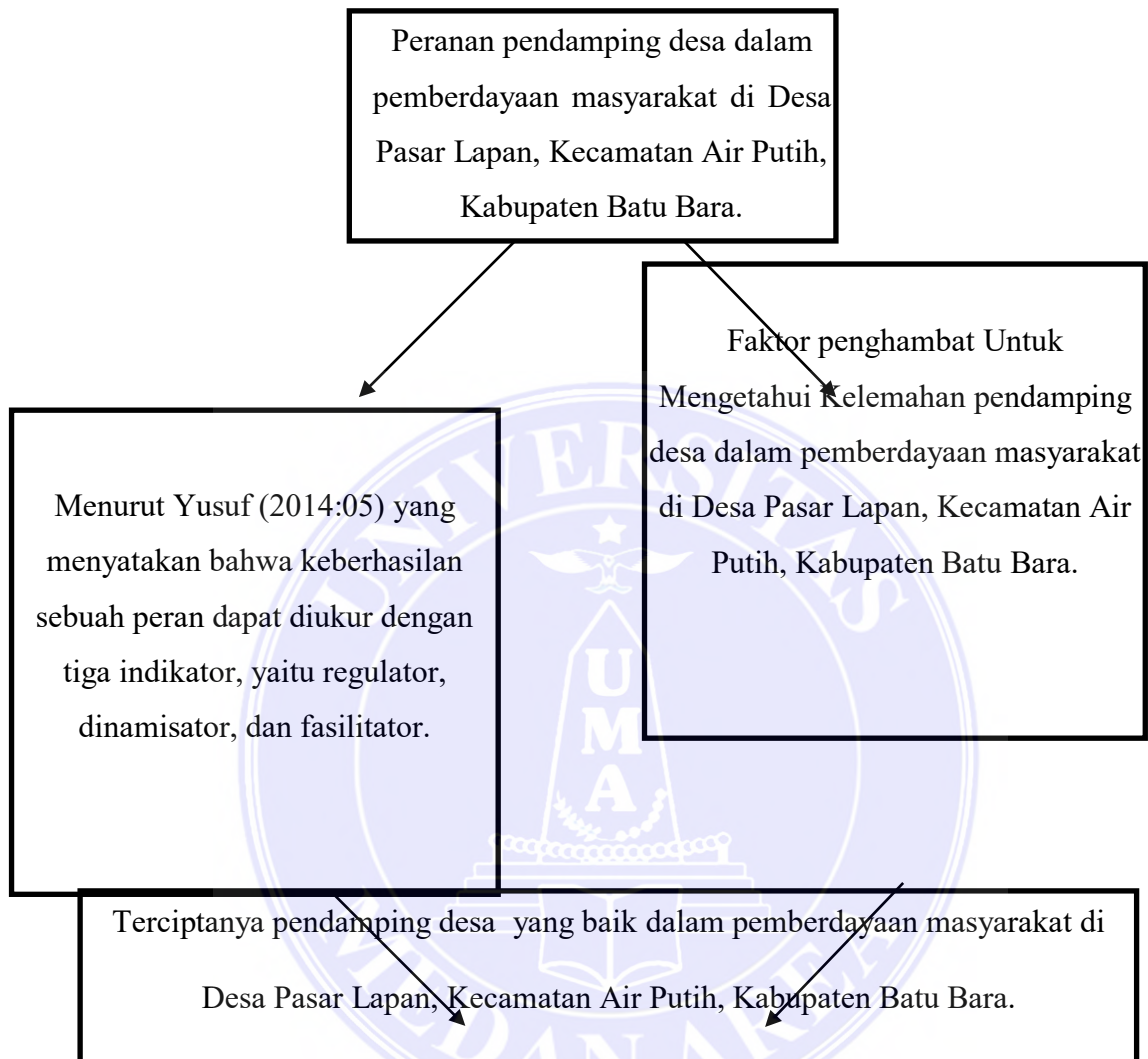
1. Regulator adalah tindakan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini di desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Peranan pedamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat

melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa

2. Dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
3. Fasilitator adalah penyedia sumber daya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

Susanti (2017:12) menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki peran strategis untuk memotivasi, membangun kesadaran, ide dan keaktifan partisipasi masyarakat di desa untuk mewujudkan desa yang mandiri atau sebagai pelaku pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat bukan hanya melakukan pendampingan pelaksanaan dan hasil pemberdayaan, tetapi berperan secara aktif mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dan menciptakan kemandirian.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yang paling ideal adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan “suatu strategi pengujian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan buat meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci” (Sugiyono,2015:15)

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:13) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya”.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yang paling ideal adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian terkait tentang Peranan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten batu Bara.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan Di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih

Kabupaten Batu Bara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian mengenai “Peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan, Kematan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.” sejak judul skripsi ini di setujui, adapun beberapa tahapan-tahapan serta perincian kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agus 2023	Sept 2023
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Perbaikan Proposal								
4	Penelitian								
5	Seminar Hasil								
6	Perbaikan Skripsi								
7	Sidang Meja Hijau								

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

3.3 Sumber Data

Sumber data menunjukkan dari mana asal data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu berupa buku, transkrip dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2020:193) data primer merupakan Sumber data primer atau sumber data utama adalah sumber data yang didapat secara langsung oleh pengumpul tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan maupun tulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata, frasa, kalimat, ekspresi, suasana, dan percakapan yang terdapat dalam dalam wawancara terhadap Informan Kepala Desa, Informan Pendamping Desa, Informn Sekretaris Desa, Staff Desa, Informan Masyarakat.

a) Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling.

Teknik Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015).

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Informan Kunci adalah ahli dunia nyata proses penelitian dan mampu memberikan data fundamental (Sugiyono, 2019:25). Adapun informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendrik Hutasoit S.kep.	1
2	Informan utama adalah orang-orang yang akrab dengan masalah penelitian yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2019:25). Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah pendamping desa yaitu Ibu Nurvera Yani ST	1
3	Informan Tambahan adalah orang-orang di daerah penelitian yang diyakini dapat emberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019:25). Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Staff Desa, dan Masyarakat Desa yaitu Ibu Ponika Hutasoit, Abangda Yudhistira Wanda, Ibu Jariyah, Bapak Paino, dan Ibu Sumanti.	5

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Moleong (2005: 159) data sekunder merupakan data tambahan yang berupa buku, majalah, Tabloid, arsip, atau dokumen pribadi yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya, dapat berupa teori, pengembangan, dan hipotesis yang ditulis oleh orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun bukan data utama, data sekunder tidak dapat diabaikan karena data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi saling melengkapi data primer. Sumber data sekunder atau sumber data kedua dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari buku-buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan yang menjadi objek penelitian di Desa Pasar Lapan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain,

sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2008 : 244). Analisis data dalam penelitian secara kualitatif ini menyangkut identifikasi apa yang menjadi perhatian dan apa yang merupakan persoalan.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2018: 229).

Guba dan Lincoln (dalam Basrofi dan Suwandi, 2008:95) menyampaikan bahwa beberapa alasan peneliti melakukan observasi antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran.
- 2) Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan yang terjadi sesungguhnya.
- 3) Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan langsung.
- 4) Mendekatkan jarak antara data dari wawancara dengan yang langsung diamati, sehingga merupakan cara untuk mengecek kepercayaan data.
- 5) Memungkinkan peneliti untuk memahami situasi-situasi yang rumit dan berbagai perilaku yang kompleks dari objek yang diteliti.

- 6) Merupakan salah satu alternatif teknik dalam kasuskasus tertentu yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik lainnya. Misalnya, mengamati perilaku subjek yang belum bisa berbicara dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek dan dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan di lapangan.

Secara lebih jelas, Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2017:226) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi terus terang atau observasi tersamar (*over observation and covert observation*) dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Observasi Partisipasi (*participant observation*), dalam observasi ini peneliti terlibat dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa saja yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam sehingga memudahkan memperoleh data yang akurat.
- b. Observasi terus terang atau tersamar (*over observation and covert observation*), dalam hal ini dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.

- c. Observasi Tidak Berstruktur (*unstructured observation*), observasi ini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah melalui pemahaman oleh peneliti, maka pada observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partipatif dengan jenis partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam observasi partisipasi peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati. Namun pada pelaksanaannya peneliti tidak terlalu terlibat dalam kegiatan informan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti bersifat partisipasi pasif dimana peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya peneliti terlibat langsung dengan tempat dilakukan penelitian tetapi tidak aktif dalam upaya yang dilakukan oleh subjek.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan dengan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya untuk mengumpulkan data yang

diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain (Ali, 1992:62).

Teknik wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wawancara, di antaranya dapat digunakan pada responden yang tidak dapat membaca dan menulis; jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat menjelaskan; pewawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembandingan, atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden (Hasan, 2002: 85).

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan penulis dengan cara metode interview, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh informan. Dalam hal ini dilakukan peneliti untuk menggali informasi dan data yang akurat dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengajuan suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Sedarmayanti, 2002: 86). Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda mati yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, rekaman gambar dan benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

Dalam metode ini yang akan dilakukan penulis adalah melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan di lapangan.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa data yang diperoleh untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bisa memastikan keabsahan dan validitas data dari subjek penelitian yang diadakan. Triangulasi adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisa data. Pada dasarnya, peristiwa yang diteliti dapat dipahami sehingga ditemukan kebenaran yang tepat dan valid jika terlihat dari sudut pandang, dan sumber informasi yang berbeda.

Teknik triangulasi digunakan untuk mendapatkan hasil data dari berbagai sumber, dengan tingkat kebenaran yang tinggi pada data yang diperoleh. Keuntungan menggunakan teknik triangulasi ini saat melakukan penelitian adalah bisa dikoreksi kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi pada instrument penelitian, triangulasi juga dapat meningkatkan kepercayaan hasil penelitian, sehingga bisa mengembangkan pertanyaan ulasan untuk mendapatkan data yang lebih detail (Nugrahani 2014:23)

Dalam metode ini, yang akan dilakukan di dalam triangulasi adalah sebagai teknik keabsahan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada disebut triangulasi Sugiyono (2010:330). Macam-macam cara dari triangulasi antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Rencana penelitian ini menggunakan uji triangulasi sumber dan uji triangulasi teknik dalam keabsahan data, sebab dalam penelitian ini akan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumen yang ada.

Dalam penelitian ini, yang dilakukan dilapangan adalah untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah peneliti dan yang diteliti oleh peneliti, Misalnya peneliti menggali data tentang peranan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pasar lapan kecamatan air putih kabupaten batu bara, selanjutnya peneliti membandingkan dengan jawaban dari pendamping desa, kepala desa, staf desa, dan masyarakat jika terdapat perbedaan, maka peneliti terus menggali data dari sumber lain sampai jawaban yang diberikan informan sama atau hampir sama.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menemukan unsur-unsur dalam bahan-bahan yang dikumpulkan untuk menambah penambahan sendiri ini bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain dan data yang baru dapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui

observasi wawancara dan studi dokumen dengan cara menyusun data menghubungkan data penyajian data narikan simpulan atau verifikasi. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dilakukan sepanjang penelitian.

Menurut Moleong (2004: 280-281), Teknik analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Penelitian memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan data mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh informan dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan dengan pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disajikan bentuk naratif.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, dalam menganalisis data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang kemudian diinterpretasikan sesuai

dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Di penelitian ini, analisis data diadakan setelah pengumpulan data atau setelah selesai pengumpulan data. Oleh karena itu, analisis data diadakan pada saat wawancara ketika peneliti sudah menganalisa jawaban yang diberikan kepada informan. Jika jawaban informan tidak menjawab tujuan penelitian dan tidak cukup spesifik, jadi peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai data yang diperoleh menjadi sah (Noeng Muhadjir, 1998:104).

Kegiatan yang diadakan dianalisis data kualitatif diadakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai akhir, sampai terjadi kejenuhan data. Data dari penelitian ini dalam analisis menggunakan model Miles & Huberman dalam Saldana (2014:12-14) menunjukkan proses analisis data terdiri atas tiga alur utama yaitu:

1. Reduksi data merupakan langkah yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif. Karena ada banyak data yang diperoleh dari survey lapangan, sehingga perlu untuk menggabungkannya menjadi satu bagian dan merangkum, memilih, memfokuskan hal-hal yang paling penting, dan mencari tema yang utama, sekaligus menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil lapangan.
2. Penyajian data dalam teknik analisis data penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, keterkaitan antar kategori, dan sebagainya. Pada tahap penyajian ini, peneliti menggolongkan atau mengelompokkan data tersebut diberi tanda khusus. Oleh karena itu, penggolongan data juga memudahkan dalam mengidentifikasi data yang paling penting dan paling tidak penting dalam tahap reduksi, sehingga peneliti dapat mengkategorikan data yang

terkumpul.

3. Penarik kesimpulan atau Verifikasi diambil setelah dua tahap sebelumnya sehingga peneliti dapat mencari dan menemukan masalah yang muncul dilapangan. Pada tahap kesimpulan ini, peneliti mencatat keturutan, pola-pola penjelas, alur kualitas, proporsi, dan konfigurasi. Selama melakukan penelitian dilapangan peneliti melakukan tahapan kesimpulan secara terus menerus. Kemudian data tersebut menjadi data yang valid.



masyarakat masih banyak yang tidak ikut partisipasi atau berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari Fasilitator bahwa pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten telah memberikan fasilitas atau bantuan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat di desa pasar lapan, Namun Masyarakat Meminta Fasilitas kepada Pemerintah Desa dan belum terealisasikan. Dan selanjutnya ditinjau dari Dinamisator bahwa pemerintah telah memberikan kegiatan-kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk guna mensejahterakan kehidupan masyarakat desa pasar lapan.

2. Adapun faktor penghambat dan kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu Kurangnya dana untuk melakukan pemberdayaan dan Minim nya sumber daya manusia dalam ikut serta pemberdayaan masyarakat. Serta Kurangnya perhatian dan sosialisasi dari pendamping desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendamping desa dalam pemberdayaan yaitu:

1. Pendamping desa menyelenggarakan kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat minimal 2 bulan sekali agar masyarakat ikut berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pendamping desa melakukan monitoring dalam kegiatan balali desa.

2. Pemerintah desa mengusulkan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat dengan memanfaatkan dana desa yang ada dengan kegiatan yang minim biaya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitri, (2011). "Community Development" Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Muhammad, (1992). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hasan Iqbal, M. (2002) Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Ife, Jim. Community Development, Creating community Alternatifves-Vision, Analysis and practice. Melbourne: Addison Wesley Longman. 1997.
- Mardikanto, Totok, dan Soeboto, Poerwowo., (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy, J., (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Sedarmayanti (2002) Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA
- Soekanto. (2001). Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto. (2002). Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung; CV. Alfabeta.
- _____. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). (Sutopo,

Ed.). Bandung: CV ALFABETA

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

_____. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Rafika Aditama.

Sundari, A., & Nurjaman, R. (2016). Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa: Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD. Jurnal Analisis Kebijakan.

Suyono, H.(2004). Sinergi Baru Pemberdayaan Keluarga. Jakarta : Yayasan Damandiri.

Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Zubaedi, 2013, Pengembangan Masyarakat (jakarta, kencana media grup) Eddy. Ch. Papilaya, 2002, dalam zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif. (Jogjakarta: Ar Ruzz media)

Jurnal/Skripsi

Hipzoni. (2019). Pandangan fiqih siyasah tentang peran dan pendamping desa pemberdayaan (pdp) dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi di kecamatan cukuh balak kabupaten tanggamus provinsi lampung). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ismail, Ahmad., (2021). Peranan pendamping desa dalam pemantauan pembangunan infrastruktur di desa lukun kecamatan tebing tinggi timur kabupaten kepulauan meranti. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Iqbal, Mochammad Rofiqul (2019). Tinjauan fiqih siyasah dan permandes pdtt nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa terhadap peranan pendamping desa keboan kecamatan ngusikan kabupaten jombang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Iyas, Yusuf. (2014). Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal
- Muhadjir, Noeng. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama.
- Nasution, Kiki Ahda. (2021). Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa bintang meriah kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Pahlevi, Reza. (2017) KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Revaldi, Agustiar. (2021). Optimalisasi peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rahmanurrasjid, Amin (2008) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DAERAH (Studi di Kabupaten Kebumen). *Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.*
- Simamora, Muhammad Khoir. (2021). Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut permendesa no.3 tahun 2015 tentang pendamping desa perspektif desa foqoh siyasah (Studi kasus rambung merah kecamatan siantar kabupaten simalungun). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Srileonita, F. (2019). Peranan pendamping desa dalam membantu pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di desa pulau tengah kecamatan benai kabupaten kuantan singingi. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Sunarti, Vevi. (2016). Peranan pendamping desa dalam membentuk masyarakat sadar bencana sebagai salah satu mitigasi bencana.
- Susanti, Martien Herna (2017). Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Jurnal Integralistik. Vol.28. No.1.
- Suyanto, & Pudjianto, Bambang. (2015). Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera (studi kasus di kabupaten sragen).
- Sunarti, V. (2016). Peranan Pendamping Desa dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencanasebagai salah Satu Mitigasi Bencana. Prosiding.

Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kamis 6 Oktober 2016

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa No.3 Tahun 2015 Tugas – tugas dan tanggung jawab

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan pendamping desadalam menjalankan peran dan fungsinya

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68, berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Undang- Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945.

Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 127 poin (2) tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Tentang pendampingan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Dokumentasi



Gambar 1 wawancara dengan Pendamping Desa
(Sumber peneliti tahun 2023)



**Gambar 2 Wawancara dengan Kepala Desa
(Sumber Peneliti Tahun 2023)**



**Gambar 3. Wawancara dengan sekretaris Desa
(Sumber Peneliti Tahun 2023)**



**Gambar 4. Wawancara dengan pegawai Desa
(Sumber Peneliti Tahun 2023)**

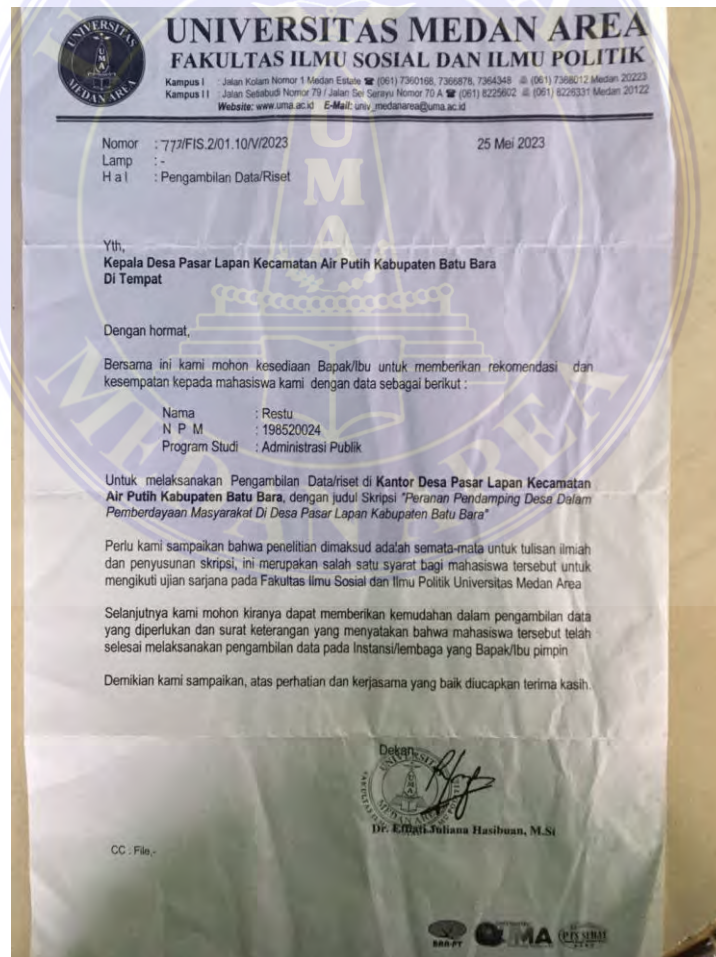


Gambar 5. Wawancara dengan Masyarakat

(Sumber Peneliti Tahun 2023)



Gambar 6. Lokasi Penelitian (Sumber Peneliti Tahun 2023)



Gambar 7. Surat Izin Riset dari Kampus (Sumber Peneliti Tahun 2023)



**Gambar 8. Surat Selesai Riset Tempat Penelitian
(Sumber Peneliti Tahun 2023)**

Lampiran 2 Panduan Wawancara

Peranan Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

Identitas Informan

Nama : Hendri Hutasoit S.kep
Jabatan : Kepala Desa
Tanggal Wawancara : 9 Juni 2023
Tempat Waktu : Kantor Kepala Desa

1. Pedoman wawancara kepada informan kunci

A. Regulator

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa?

B. Fasilitator

1. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi untuk masyarakat?
2. Apa saja yang sudah dilakukan pendamping desa dalam memberikan fasilitas yang baik ke masyarakat?

C. Dinamisator

1. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan?
2. Apakah pernah di adakan pelatihan atau sosailasi di Desa Pasar Lapan?
3. Apakah proses perencanaan dan pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar?

2. Pedoman Wawancara Kepada informan Utama

Identitas Informan

Nama : Nurvera Yani ST
Jabatan : Pendamping Desa
Tanggal Wawancara : 12 Juni 2023
Tempat Waktu : Kantor Kepala Desa

A. Regulator

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasar Lapan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa?

B. Fasilitator

1. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi untuk masyarakat?
2. Secara garis besar, fasilitas apa saja yang telah diberikan kepada pemerintah desa untuk masyarakat?

C. Dinamisator

1. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan?
2. Apakah pernah di adakan pelatihan atau sosailasi di Desa Pasar Lapan?
3. Apakah proses perencanaan dan pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar?

3. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan

Identitas Informan

Nama : Ponika Hutasoit
Jabatan : Sekretaris Desa
Tanggal Wawancara : 9 Juni 2023
Tempat Waktu : Kantor Kepala Desa

Identitas Informan

Nama : Yudhistira Wanda
Jabatan : Staff Desa
Tanggal Wawancara : 9 Juni 2023
Tempat Waktu : Kantor Kepala Desa

Identitas Informan

Nama : Paino
Jabatan : Masyarakat
Tanggal Wawancara : 9 Juni 2023g
Tempat Waktu : Rumah Masyarakat

Identitas Informan

Nama : Sumanti
Jabatan : Masyarakat
Tanggal Wawancara : 12 Juni 2023
Tempat Waktu : Rumah Masyarakat

Identitas Informan

Nama : Jariyah
Jabatan : Masyarakat
Tanggal Wawancara : 12 Juni 2023
Tempat Waktu : Rumah Masyarakat

A. Regulator

1. Apakah peran pendamping desa dalam program pemberdayaan masyarakat terealisasi?

B. Fasilitator

1. Apakah ada bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi untuk masyarakat?
2. Apa saja yang diberikan pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat?

C. Dinamisator

1. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah desa untuk mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasar Lapan?
2. Apakah pernah di adakan pelatihan atau sosailasi di Desa Pasar Lapan?
3. Apakah proses perencanaan dan pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar?

